

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja sektor publik ini sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Menurut Mahoney (1963) dalam (Husni, 2015) kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi, pengaturan staf, negosiasi, dan lain-lain. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Kinerja manajerial adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam kegiatan - kegiatan manajerial. Kinerja manajerial dalam sebuah organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan kinerja manajerial yang baik dapat menciptakan keunggulan daya saing suatu organisasi Handayati & Safitri, (2020)

Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah hasil dari proses aktivitas manajerial sektor publik yang efektif dalam melaksanakan kegiatan manajerial mulai dari proses perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan Putra, (2013). Dalam kinerja manajerial dibutuhkan adanya, komitmen organisasi, akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan desentralisasi.

Komitmen organisasi adalah keyakinan atau dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Komitmen organisasi merupakan nilai personal, yang kadang-kadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan/organisasi atau komitmen pada perusahaan A.R, (2010). Dalam komitmen organisasi dibutuhkan adanya akuntabilitas publik agar dapat meningkatkan kinerja karena semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan semakin baik pula kinerjanya mencapai tujuan organisasi.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaran pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik partisipatoris (Mardiasmo, 2006) dalam Putra, (2013).

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang kepada manajer yang parasnya lebih rendah. Wewenang yang didelegasikan kepada manajer bawahan itu beraneka ragam. Pada titik terendah hanya keputusan beban yang didelegasikan. Pusat beban merupakan pusat pertanggungjawaban yang menerima delegasi wewenang terendah ini. Pada titik tertinggi, wewenang yang didelegasikan sangat luas yang meliputi keputusan bebas, pendapatan, laba dan investasi (Sodikin, 2015: 234) dalam Senduk *et al.*, (2017).

Desentralisasi telah mampu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

adalah mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat seperti pembangunan sarana umum, selain itu dengan pengalokasian yang tepat pada belanja pemerintah maka diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat Kusuma, (2016). Desentralisasi itu sendiri diperlukan dalam sebuah organisasi karena adanya kondisi administrasi yang semakin kompleks, begitu juga dengan tugas dan tanggung jawab sehingga perlu pendeligan otoritas pada manajemen yang lebih rendah. Struktur organisasi memiliki peranan yang begitu penting dalam mempengaruhi kinerja pada tingkat organisasi maupun tingkat sub unit. Pengaruh tersebut terjadi karena dengan adanya desentralisasi penetapan kebijakan dilakukan oleh manajer lebih memahami kondisi unit yang dipimpinnya sehingga kualitas kebijakan diharapkan akan menjadi lebih baik

Penelitian sebelumnya oleh Senduk *et al.*, (2017), Seber *et al.*, (2019) Hidayati & Dianawati, (2017) menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sedangkan Lempas *et al.*, (2014) dan Badewin & Nurdin, (2020) menunjukkan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

UU No. 32 dan 33 tahun 2004. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi alam dan potensi ekonomi yang dimiliki serta melakukan pemerataan pembangunan melalui program-program kegiatan dengan skala prioritas, yang disusun melalui partisipasi aktif dari pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diartikan merupakan keikutsertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama. Bangun, (2009)

Partisipasi penyusunan anggaran diukur dengan menilai sejauh mana ide manajer mempengaruhi keputusan, seberapa besar pertimbangan manajer dipakai dalam penentuan anggaran dan seberapa sering atasan meminta pertimbangan bawahan Moheri & Arifah, (2015). Selain partisipasi anggaran, desentralisasi juga dibutuhkan dalam suatu kinerja organisasi karena adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan-pembangunan daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional

Penelitian sebelumnya oleh Wiranto *et al.*, (2017), Anggraeni & Riharjo, (2020) dan Triseptya *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penelitian sebelumnya oleh Seber *et al.*, (2019) dan Medihayanti & Suardana, (2015) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut Sari *et al.*, (2014).

Karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi, hal ini berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, penganggaran sektor publik berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter Efrizar, (2017) Dalam kinerja manajerial

kejelasan sasaran anggaran dapat mempermudah aparat dalam menyusun anggaran, sehingga target-target anggaran yang disusun dapat sesuai dengan sasaran.

Penelitian sebelumnya oleh Seber *et al.*, (2019), Melia & Sari, (2019) dan Anggraeni & Riharjo, (2020) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial. Sedangkan penelitian sebelumnya oleh Saraswati, (2019) dan Suryani & Pujiono, (2020) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung- jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). (Mahmudi, 2010:23) dalam Nafidah & Anisa, (2017).

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas Sadjarto,(2000). dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas

semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. dengan demikian semakin tinggi tingkat akuntabilitas publik maka semakin tinggi kinerja manajerial pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya oleh Seber *et al.*, (2019), Melia & Sari, (2019) dan Efrizar, (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. Sedangkan penelitian sebelumnya oleh Anggraeni & Riharjo, (2020) dan Heski *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Riharjo, (2020) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial.?
2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.?
4. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial.?
5. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh desentralisasi publik terhadap kinerja manajerial OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan?

6. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan?
7. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan?
8. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh dakuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial
2. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial
3. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggran anggaran terhadap kinerja manajerial
4. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial
5. Untuk menganalisis komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
6. Untuk menganalisis komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

7. Untuk menganalisis komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
8. Untuk menganalisis komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk meningkatkan kinerja manajerial harus transparansi, efektif, efisien dan akuntabilitas dan konsep-konsep tentang dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan sebagai dukungan dalam peningkatan kinerja manajerial di OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

2. Manfaat teoritis

Menambah pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti dan diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah kinerja manajerial.